

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Batam Kota adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Batam Kota periode 2021 - 2026, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) di tingkat Kecamatan Batam Kota, dan Rencana Reformasi Birokrasi di Kantor Kecamatan Batam Kota. Selain itu, Lakip ini juga di susun dengan berpedoman pada Renstra 2021 – 2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan Misi pembangunan, serta Visi Kota Batam 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2021 – 2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staff Kantor Kecamatan Batam Kota harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kecamatan Batam Kota yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan Kesejahteraan Masyarakat, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan renstra termasuk indikator – indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Batam Kota periode 2021 – 2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD 2021 – 2026.

Batam, Februari 2025

CAMAT BATAM KOTA



FIRMAN HIDAYAT, S.E, M.M.
NIP. 19850522 201101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. . Latar Belakang	1
B. . Data Umum Organisasi dan Tata Kerja.....	3
C. . Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	18
D. . Landasan Hukum.....	20
E. . Sistematika Penyajian.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. . Rencana Strategis	23
B. . Rencana Kinerja	27
C. . Perjanjian Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. . Capaian Kinerja.....	41
B. . Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik "*good and service*" disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaik disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Perlu diperhatikan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar Akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas administrasi pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali “controllableactivities” dengan kegiatan yang tidak terkendali “uncontrollable activities”. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Artinya kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan .

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu atas Pelaporan Kinerja instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKJIP

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Batam Kota tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKJIP Tahun 2023 berdasarkan Indikator (Input, Output, Outcomes, dan Benefits) juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batam Kota yang menjadi laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan oleh camat kepada walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKJIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2023.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, maka Kecamatan Batam Kota Kota Batam dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- **Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
2. Menyelenggarakan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
3. Merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
4. Membina organisasi dan aparatur kelurahan;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
6. Melakukan pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di kelurahan;

7. Menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 9. Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 10. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup tugasnya;
 11. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkup tugasnya;
 12. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugasnya;
 13. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dalam lingkup tugasnya;
 14. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam lingkup tugasnya;
 15. Membina penyelenggaraan kelurahan;
 16. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan;
 17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Sekretaris Camat
Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan perencanaan, tata laksana, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
 1. Menghimpun dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program, ketatausahaan dan urusan rumah tangga kecamatan;
 2. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana kecamatan;
 3. Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;

4. Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan kecamatan;
6. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Kecamatan membawahi:

(1) Subbagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun bahan laporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
- Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan aset Kecamatan;
- Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan Kecamatan;
- Melaksanakan administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan penyusunan rencana program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan, hukum, kehumasan dan urusan umum lainnya;
- Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

• Seksi Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang pemerintahan;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
3. Menghimpun dan menginventarisir tugas-tugas, tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah di kecamatan;

4. Mempersiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan kecamatan lingkup tugas pemerintahan;
 5. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya .
- **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

 1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang ketentraman dan ketertiban;
 2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban umum di Kecamatan;
 4. Melakukan koordinasi antary instansi terkait;
 5. Menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang meliputi patroli wilayah kecamatan;
 6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan ;
 7. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 - **Seksi Pelayanan Umum**

Dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

 1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang pelayanan umum;

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan umum;
 3. Menyelenggarakan pelayanan umum di kecamatan;
 4. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan umum di kecamatan;
 5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan pelayanan umum di Kecamatan;
 7. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Seksi Kesejahteraan Rakyat

Dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan kesejahteraan rakyat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

 1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang kesejahteraan rakyat;
 2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang meliputi pembinaan dan peningkatan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup kecamatan;
 3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data lingkup kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial;
 4. Melaksanakan pemantauan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup kecamatan;
 5. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan bantuan sosial di kecamatan;
 6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

7. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang kepala, mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

 1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengidentifikasi data-data pembangunan dan pemberdayaan kelurahan, masyarakat miskin serta kelembagaan masyarakat;
 4. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lingkup kecamatan;
 5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
 6. Melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kecamatan;
 7. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
 8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;

10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

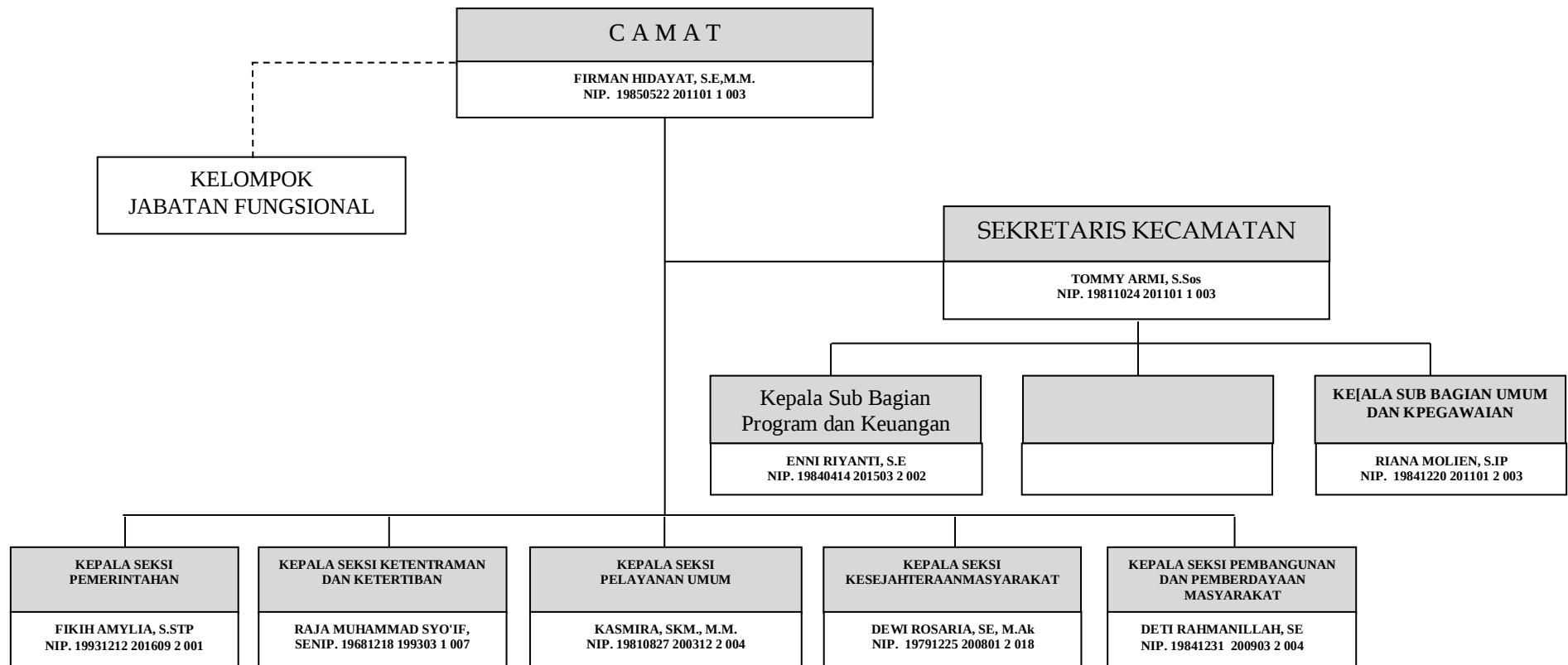
b. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur Organisasi Kecamatan Batam Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 14 Nopember 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang uraian tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Perda Kota Batam

Nomor : 13 Tahun 2007

Tanggal : 14 Nopember 2007



Secara rinci Struktur Organisasi Kecamatan Batam Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Batam Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan didukung dan dipengaruhi oleh beberapa aspek-aspek strategis yang merupakan potensi sumber daya maupun aset yang dimiliki.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Batam Kota didukung oleh personil Kelurahan dan Kecamatan pada tahun 2024 sebanyak 88 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 55 orang, PPPK sebanyak 4 Orang dan THD/THL sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pangkat/Golongan

NO	KANTOR CAMAT/KELU RAHAAN	PNS/GOLONGAN																PPPK	JUMLAH	
		I				II				III				IV						IX
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
1	Kecamatan							2	1	2		10	8	1				4	28	
2	Sukajadi										1	4	1						6	
3	Taman Baloi								1	1	1	3	1						7	
4	Baloi Permai											3	4						7	
5	Teluk Tering											4	1	1					6	
6	Belian										3	3	1						7	
7	Sungai Panas								1		2	1	2						6	
	JUMLAH							2	3	3	7	28	18	2				4	67	

Sumber : Kecamatan Batam Kota

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN BATU AJI
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	KET
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2		
01	CAMAT					1		1	
02	SEKRETARIS KECAMATAN					1		1	
03	KASI PEMERINTAHAN					1		1	
04	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN					1		1	
05	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT						1	1	
06	KASI PELAYANAN UMUM						1	1	
07	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					1		1	
08	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN					1		1	
09	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					1		1	
10	STAF KECAMATAN			4	2	12	1	19	
11	LURAH					6		6	
12	SEKLUR					5	1	6	
13	KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM KELURAHAN				1	5		6	
14	KASI KETERTIBAN UMUM KELURAHAN				1	5		6	
15	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				1	5		6	
16	STAF KELURAHAN			4	1	4		9	

17	STAF THD/HONOR KELURAHAN			4		3		7	
18	STAF THD / HONOR KECAMATAN			1		12		13	
JUMLAH				13	6	64	4	87	

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Pegawai Negei Sipil (PNS) di Kecamatan Batam Kota banyak golongan III dengan tingkat pendidikan D4 dan S1. Mengingat tuntutan akan ilmu dan memperkuat barisan dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Batam Kota maka Pegawai Negeri Sipil dengan semangat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi hal ini akan berpengaruh terhadap kualifikasi jenjang kepangkatan.

d. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan Prasarana Barang Milik/Kekayaan Daerah (BM/KD) Kecamatan Batam Kota Kota Batam per 31 Desember 2024 terlampir.

C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Kecamatan Batam Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam. Kecamatan Batam Kota berupaya mempersiapkan langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam Rencana Kerja (RENJA) untuk kegiatan pembangunan tahunan dalam rangka meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui kegiatan Pelayanan kemasyarakatan dan mengacu pada Visi Kota Batam :

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan sejahtera “

Kecamatan Batam Kota harus mendukung secara penuh visi dan misi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Batam Kota diharapkan mampu untuk menyumbang andil dalam pencapaian visi dan misi tersebut, maka maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Batam Kota dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Untuk memberikan berbagai informasi dan gambaran umum tentang Kecamatan, peran fungsi kecamatan dan permasalahan yang dihadapi;
- b. Untuk mengadakan sebagian wewenang walikota sebagaimana tercantum dalam pelimpahan wewenang dari walikota ke camat;

- c. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Batam Kota sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota;
- d. Mengamankan dan melaksanakan secara aktif segala Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan memperhatikan potensi wilayah yang tersedia;
- e. Untuk mensinkronkan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- f. Untuk mengawasi pemerintahan dibawahnya (Kelurahan).

2. Tujuan

- a. Memberikan Pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien;
- b. Sebagai wadah/tempat pelayanan masyarakat terdepan setelah Pemerintah Kelurahan;
- c. Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya masyarakat perkotaan maupun hinterland yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh;
- d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan harkat masyarakat perkotaan dan hinterland dengan menggali nilai seni dan budaya yang berkembang dimasyarakat serta pembinaan olah raga;
- e. Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan perdagangan dan industri yang berteknologi maju;
- f. Sebagai wadah feedback bagi pemerintah kelurahan maupun masyarakat setempat.

Selanjutnya perubahan status Batam dari Kotamadya Administratif menjadi Kota Batam, sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Kecamatan Batam Kota merupakan salah satu Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kota Batam. Kecamatan Batam Kota diresmikan pada tanggal 3 Juni 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pemekaran, Perubahan, Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Batam. Dimana Pemekaran Kecamatan Nongsa merupakan salah satu dari bagian Kecamatan yang dimekarkan di Kota Batam ini dan Kecamatan Nongsa sebagai Kecamatan Induk yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu kecamatan Nongsa dan Kecamatan Batam Kota. Dengan demikian

Kecamatan Batam Kota merupakan Satuan Kerja yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Batam.

Kecamatan Batam Kota terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sukajadi
2. Kelurahan Taman Baloi
3. Kelurahan Baloi Permai
4. Kelurahan Teluk Tering
5. Kelurahan Belian
6. Kelurahan Sungai Panas

Tujuan dari pelaksanaan pemekaran Kecamatan dan kelurahan ini yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang disejalankan dengan upaya memperpendek rentang kendali secara organisasi pemerintahan dan juga upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada SPP (Standartd Pelayanan Publik) yang meliputi antara lain : syarat – syarat, lama waktu proses, serta pembiayaan yang di tampilkan dalam bentuk papan informasi untuk diketahui secara umum dengan mengedepankan aspek transparansi, objektif, standard, partisipasi kesetaraan, daya tanggap, pengawasan, efisien dan efektifitas serta profesionalisme.

Kecamatan Batam Kota secara geografis merupakan daerah perkotaan dan kawasan Industri yang terdiri dari Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Belian, dan Kelurahan Sungai Panas.

Kecamatan Batam Kota memiliki potensi yang baik untuk pengembangan Kawasan Industri. Pada umumnya pemukiman penduduk heterogen dan sebagian besar bermata pencaharian Pegawai Negeri Sipil, Swasta dan Wiraswasta. Selain itu Kecamatan Batam Kota terdapat bebeapa Kantor Pemerintah Kota Batam.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Batam Kota Batam dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Batam Kota dan di kelurahan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan;
2. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.

D. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKJIP Pemerintah Kecamatan Batam Kota dasar Hukum Kecamatan Batam Kota untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kota Batam (lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37 seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Nomor 5 seri D) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam;

9. Peraturan Walikota Batam Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Kota Batam Tahun 2006-2011;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 04.A Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dari Walikota Batam kepada Camat;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam.

E. Sistematika Penyajian

Dalam Laporan Akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Tahun 2024. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Dari segi pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan masih sangat terbatas, hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut, dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran.

Capaian kinerja per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, lingkungan strategis organisasi dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Strategik

Menguraikan rencana strategik dan rencana kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Batam Kota di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategi yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD Kota Batam. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur pertanggung jawaban camat selaku pembantu kepala daerah pada akhir tahun anggaran .

Kecamatan Batam Kota telah menyusun draft rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan di Kecamatan Batam Kota, yang menempatkan renstra sebagai komitmen bersama Kecamatan Batam Kota beserta seluruh karyawan dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap

tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan sebagai pelayan masyarakat.

Proses penyusunan renstra dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kepada tujuan, sasaran dan strategi pemcapaiannya.

menyusun Perencanaan Kinerja dengan rumusan sebagai berikut:

Visi pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.”

Adapun Misi Kota Batam adalah:

1. Mewujudkan Pelayanan Birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan. Dengan mewujudkan pelayanan pada setiap individu dan birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan dengan sifat transparan;
2. Menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, dan siap bersinergis, dan berkompetesi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
3. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tamoung dan daya dukung linhkungan sesuai dengan tata ruang kota batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam;
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.;
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik

2.1.1 VISI dan MISI KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2016-2021

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Batam, Rencana Strategis Kecamatan Batam Kota 2016-2021 berpedoman pada RPJMD Kota Batam 2016-2021.

2.1.1 Visi

Visi Kecamatan Batam Kota adalah **“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Batam Kota yang Berbudaya, Cerdas, Sehat serta Beriman dan menjadi andalan pusat pertumbuhan ekonomi”**

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi Kecamatan Batam Kota adalah:

- 1) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan serta peningkatan wawasan kebangsaan;
- 3) Mewujudkan Pelayanan yang Prima, bersih dan berwibawa serta Reformasi Birokrasi.

1) Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Kecamatan Batam Kota adalah:

Terciptanya Sistem Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien;

1. Mengakomodir Masukan Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
2. Meningkatkan Keharmonisan antar Kelompok Organisasi dan Kerukunan Umat Beragama
3. Mewujudkan Pentaan Lingkungan yang Teratur dengan Konsep Pemberdayaan Masyarakat
4. Meminimalisir keluhan Masyarakat Terhadap Masalah Persampahan di Kecamatan.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batam Kota adalah:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 2) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi
- 3) Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan
- 4) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik di setiap Kelurahan
- 5) *Zero Complaint* terkait masalah Sampah di Kecamatan Batam Kota.

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kualitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun guna mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran Kecamatan Batam Kota diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Ada pun sasaran Kecamatan Batam Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Layanan Masyarakat melalui pembuatan KTP, KK, Kartu Pencari Kerja (Ak 1), dan surat menyurat lainnya.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung dan mensukses program pemerintah.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi maupun kelembagaan pemberdayaan masyarakat melalui diklat,

bimtek, dan pelatihan ketrampilan, sosialisasi dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan.

6. Meningkatkan etos kerja dan kinerja melalui pembinaan tugas belajar dan workshop.
7. Meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masyarakat melalui pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
8. Meningkatnya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan event-event.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Batam Kota Kota Batam

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batu Aji yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	55.50%	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	71.25%	71.25%
			Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	20.00 %	20.00 %	13.00 %	10.00 %	8.00 %	5 %	5 %
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batu Aji yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.62 %	82.00%	88.31 %	89.90 %	90.00 %	91.00 %	91.00 %
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	terlaksana							
			Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Kecamatan Batam Kota mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di dalam suatu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batam Kota kemudian diformulasikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan. Dalam rencana kinerja tahunan diuraikan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Batam Kota untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan *benchmark* dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Kecamatan Batam Kota disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian dikompilasi ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Batam Kota (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2024, dan merupakan komitmen penuh dalam mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misi Kecamatan Batam Kota. Fokus utama dalam penetapan Rencana Kinerja Tahun 2024 adalah alokasi sumber dana dan sumber daya yang dimiliki dan usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

a. Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Penetapan Sasaran Strategis

Kecamatan Batam Kota mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin di capai tahun 2024. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang telah ditetapkan, Kecamatan Batam Kota merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Batam Kota menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

b. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kecamatan Batam Kota telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai, juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, termasuk indikator kinerjanya beserta target kinerja kuantitatif dalam rangka mencapai kinerja yang paling maksimal dalam bentuk rencana kinerja tahun 2024.

C. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting perlu dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna, untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Batam Kota Batam

Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2024

NO	SASARAN/STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	100%
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase usulan Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan	100%

Untuk pencapaian indikator kinerja diatas akan dilaksanakan melalui program kegiatan sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Batam Kota Kota Batam 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
1.	Program Pengolahan Sampah	Persentase Pengangkutan sampah yang tidak tuntas	2.228.143.400
	Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah	2.228.143.400
	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.228.143.400
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	14.786.913.832
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	13.307.976.900

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13.307.976.900
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	130.098.100
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	1.886.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69.390.950
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.191.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	31.030.150
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.600.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	157.455.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46.555.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	110.900.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	1.018.953.832
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	190.218.800
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	828.735.032
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	172.430.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39.980.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		75.330.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75.330.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		29.120.000
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	8.204.349.850
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.204.349.850
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 3 Laporan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	326.349.850
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.878.000.000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	186.542.850
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	186.542.850
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.515.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	52.514.000

	Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.513.850
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1.641.106.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1.641.106.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	295.642.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	961.544.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	383.920.000
	KELURAHAN SUKAJADI		
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	175.252.200

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	123.821.400
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	708.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.101.000
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	111.244.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.868.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		900.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	50.830.800
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50.830.800
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	730.405.550
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	559.201.550
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37.450.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	445.751.700

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.999.850
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	171.204.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.534.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.534.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.534.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.534.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.534.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.534.000

	KELURAHAN TAMAN BALOI		
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	233.169.430
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	132.846.150
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	703.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.918.950
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	119.893.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.331.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	99.723.280
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	54.723.280
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44.993.980
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.390.072.950
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang	3.218.293.900

		aktif dalam kegiatan pemberdayaan	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.714.800
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.074.531.200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.047.900
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	171.779.050
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.629.550
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.629.900
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.629.900
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.629.900
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	28.629.900

		Lainnya	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.629.900
	KELURAHAN BALOI PERMAI		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	261.530.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	130.997.000
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	706.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.243.250
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118.468.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.579.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	129.933.600
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	71.026.400
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58.907.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.	3.858.747.700

		Persentase Warga yang berdaya	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.686.968.650
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.767.800
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.530.755.900
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.444.950
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	171.779.050
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.629.550
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.629.900
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.629.900
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.629.900

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.629.900
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.629.900
	KELURAHAN TELUK TERING		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	234.709.650
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	129.039.750
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	641.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	132.143.250
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	117.318.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.284.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	1.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	101.966.400
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	43.059.200
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58.907.200

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.705.530.050
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	1.533.318.750
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.267.750
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.414.411.200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.639.800
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	172.211.300
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.701.650
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.701.650
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.701.650

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.701.650
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.701.650
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.701.650
	KELURAHAN BELIAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	267.969.980
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	129.734.800
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	899.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.783.500
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	117.318.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.234.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	1.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	137.635.180

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	137.635.180
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44.993.980
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	5.082.072.700
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	4.911.622.250
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.753.300
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4.814.445.100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.423.850
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	170.450.450
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.408.700
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang	28.408.350

		Kepemilikan Rumah	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.408.350
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.408.350
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.408.350
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.408.350
	KELURAHAN SUNGAI PANAS		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	3.480.044.840
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	243.638.590
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	739.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.118.000
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	127.587.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.521.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	900.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100.173.340
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58.430.800
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41.742.540
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.236.406.250
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.065.374.450
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.265.700
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.956.479.800
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81.628.950

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	171.031.800
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.505.300
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.505.300
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.505.300
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.505.300
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.505.300
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.505.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, skala nilai peringkat kinerja ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini;
- b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batam Kota yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	64.50%	98,01%	152,71%	Sangat baik	Kecamatan Batu Aji
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90%	98,01%	108,9%	Sangat baik	Kecamatan Batu Aji
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batam Kota yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	93,41%	103,78%	Sangat baik	Kecamatan Batu Aji

	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	95,37%	95,37%	Sangat baik	Kecamatan Batu Aji
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	91,44%	91,44%	Sangat baik	Kecamatan Batu Aji

Tabel 3.3
Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batam Kota yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	59.25 %	59.25 %	100 %	61.75 %	61.75 %	100 %	64.50 %	99.11 %	99.11 %
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	18.00 %	18.00 %	100 %	13.00 %	13.00 %	100 %	10.00 %	99.11 %	99.11 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batam Kota yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90%	95.59%	95.59%

	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	99.75 %	99.75 %
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	92.10%	92.10%

Tabel 3.4

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2024	Target 2025	Tingkat Kemajuan
Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Jumlah kelurahan yang terlayani dalam pelayanan pengangkutan sampah/Jumlah kelurahan wilayah kecamatan x 100	10.00 %	8.00 %	80.00 %

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana x 100	100%	100 %	100 %
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan APBD/RKPD x 100	100%	100 %	100 %

Tabel 3.5

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batam Kota yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	64.50 %	99.11 %	99.11 %	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah	Melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat pengelolaan sampah

		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	10.00 %	99.11 %	99.11 %	Kurangnya anggaran, armada dan tenaga kerja dalam melayani pengangkutan sampah	Menambah anggaran, armada dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batam Kota yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	95.59%	95.59%	Belum maksimalnya masyarakat mengetahui informasi pelayanan melalui teknologi informasi	Melakukan kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	99.75 %	99.75 %	Kurangnya kejelasan dan pemahaman pegawai dan Masyarakat dalam pelaksanaan prosedur pelayanan	Mengikutkan pegawai bimtek dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai prosedur pelayanan
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	92.10%	92.10%	Anggaran yang tidak cukup untuk mengakomodir usulan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Menggunakan skala prioritas dalam memilih usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tabel 3.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja 2024			Anggaran Tahun 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batam Kota yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	64.50 %	99.11 %	99.11 %	2.228.143.400	2.208.357.216	99.11	
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	10.00 %	99.11 %	99.11 %	2.228.143.400	2.208.357.216	99.11	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batam Kota yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	95.59%	95.59%	17.844.290.282	17.059.125.308	95.59	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	99.75 %	99.75 %	8.204.349.850	8.184.261.995	99.75	
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	92.10%	92.10%	18.189.778.050	16.752.927.994	92.10	

Tabel 3.7
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batam Kota yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	99.11				
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	99.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	99.11 %	Menunjang
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batam Kota yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.59				
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	99.75	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	99.75	Menunjang
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	92.10	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	92.10	Menunjang

				Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	95.89	Menunjang
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	90.00%	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Belanja yang berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik Kecamatan Batam Kota Kota Batam pada 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai Berikut:

Tabel 3. 8
Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Batam Kota Kota Batam

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1.	Program Pengolahan Sampah	Persentase Pengangkutan sampah yang tidak tuntas	2.228.143.400	2.208.357.216	99,11
	Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah	2.228.143.400	2.208.357.216	99,11
	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.228.143.400	2.208.357.216	99,11
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	14.786.913.832	14.449.730.110	97,72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	13.307.976.900	13.207.924.423	99,25
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13.307.976.900	13.207.924.423	99,25
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	130.098.100	127.707.810	98,16
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	1.886.000	1.841.000	97,61
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69.390.950	67.776.750	97,67
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.191.000	23.901.000	98,80
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	31.030.150	30.589.060	98,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan		3.600.000	3.600.000	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		157.455.000	157.099.000	99,77
	Pengadaan Mebel		46.555.000	53.015.000	113,88
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		110.900.000	104.084.000	93,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	1.018.953.832	814.669.602	79,95

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	190.218.800	126.168.546	66,33
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	828.735.032	688.501.056	83,08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	172.4360.000	142.329.275	82,54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39.980.000	39.026.800	97,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		75.330.000	46.629.100	61,90
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27.400.000	27.125.000	99,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	444.000	74,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		29.120.000	29.104.375	99,95
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	8.204.349.850	8.184.261.995	99,76
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.204.349.850	8.184.261.995	99,76
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 3 Laporan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	326.349.850	320261.995	98,13
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.878.000.000	7.864.000.000	99,82
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	186.542.850	183.254.295	98,24

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	186.542.850	183.254.295	98,24
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.515.000	88.090.500	98,41
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	52.514.000	51.360.000	97,80
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.513.850	43.803.795	98,40
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1.641.106.000	1.482.924.500	90,36
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1.641.106.000	1.482.924.500	90,36
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	295.642.000	280.546.000	94,89
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	961.544.000	921.406.000	95,83

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	389.920.000	280.972.500	73,19
	KELURAHAN SUKAJADI				
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	175.252.200	144.914.738	82,69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	123.821.400	117.709.600	95,06
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	708.000	695.000	98,16
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.101.000	5.931.000	97,21
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	111.244.000	106.326.000	95,58
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.868.400	3.857.600	79,24
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	50.830.800	26.905.138	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50.830.800	26.905.138	52,93
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	730.405.550	683.020.915	52,93
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	559.201.550	515.814.495	50,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37.450.000	36.500.000	50,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	445.751.700	403.700.000	93,51
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	75.999.850	75.614.495	92,24

		di Kelurahan			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	171.204.000	167.206.420	97,46
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.534.000	28.026.800	90,57
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.534.000	27.787.300	99,49
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.534.000	27.915.420	97,67
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.534.000	28.136.800	98,22
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.534.000	27.567.300	97,38
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.534.000	27.772.800	97,83
	KELURAHAN TAMAN BALOI				
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	233.169.430	194.520.618	83,42
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	132.846.150	122.606.740	92,29
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	703.000	699.000	99,43

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.918.950	6.308.200	91,17
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	119.893.000	110.484.000	92,15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.331.200	5.115.540	95,95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	99.723.280	71.613.878	71,81
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	54.729.300	26.904.454	49,16
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	44.993.980	44.79.424	99,37
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000	300.000	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	300.000	50,00
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.390.072950	2.962.851.869	87,40
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.218.293.900	2.793.468.234	86,80
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.714.800	25.741.904	96,36
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.074.531.200	2.653.347.400	86,30
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.047.900	114.378.930	97,72

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	117.779.050	169.383.635	98,61
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.629.550	28.327.985	98,95
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.629.900	28.201.330	98,50
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.629.900	28.201.330	98,50
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.629.900	28.250.330	98,67
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.629.900	28.201.330	98,50
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.629.900	28.201.330	98,50
	KELURAHAN BALOI PERMAI				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	261.530.600	200.663.044	76,73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	130.997.000	110.141.925	84,08
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	706.000	703.500	99,65
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.243.250	5.181.700	98,83

		yang Disediakan			
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118.468.000	97.757.500	82,52
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.579.750	6.499.225	98,78
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	129.933.600	90.221.119	69,44
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	71.026.400	31.708.087	44,64
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58.907.200	58.513.032	99,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000	300.000	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	300.000	50,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.858.747.700	3.301.979.629	85,57
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.686.868.650	3.134.025.209	85,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.767.800	34.861.044	87,66
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.530.755.900	2.988.966.000	84,66
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.444.950	110.198.165	94,64
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	171.779.050	167.954.420	97,77
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	28.629.550	27.866.900	97,34

		Keuarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.629.900	27.867.200	97,34
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.629.900	27.631.330	96,51
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.629.900	28.236.330	98,63
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.629.900	28.181.330	98,43
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.629.900	28.171.330	98,40
	KELURAHAN TELUK TERING				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	234.709.650	186.040.828	79,26
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	132.143.250	105.617.600	79,93
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	641.000	636.000	99,22
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.100.250	6.007.000	98,47
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	117.318.000	90.989.000	77,56
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	6.284.000	6.185.600	98,43

		yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan		1.800.000	1.800.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	101.966.400	80.123.228	78,58
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	43.059.200	21.610.196	50,19
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58.907.200	58.513.032	99,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000	300.000	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	300.000	50,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.705.530.050	1.675.012.620	98,21
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	1.533.318.750	1.512.758.910	98,66
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.267.750	30.759.250	98,37
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.414.411.200	1.398.527.000	98,88
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.639.800	83.472.660	95,25
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	172.211.300	162.253.710	94,22
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.701.650	27.372.055	95,37
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	28.701.650	27.372.055	95,37

	dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.701.650	26.602.055	92,68
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.701.650	28.252.055	98,43
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.701.650	26.6025.055	92,68
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.701.650	26.602.055	90,77
	KELURAHAN BELIAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	267.969.980	199.153.026	74,32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	129.734.800	123.852.810	95,47
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	899.000	874.000	97,22
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.783.500	5.776.500	99,88
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	117.818.000	112.040.000	95,10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.234.300	5.162.310	98,62

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	137.635.180	75.000.216	54,49
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	92.641.200	30.290.792	32,70
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44.993.980	44.709.424	99,37
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000	300.000	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	300.000	50,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	5.082.072.700	4.843.503.025	95,31
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	4.911.622.250	4.675.645.010	95,20
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.753.300	29.877.210	94,09
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4.814.445.100	4.588.302.800	95,30
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.423.850	57.465.000	87,83
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	170.450.450	167.858.015	98,48
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.408.700	27.963.290	98,43
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni	28.408.350	28.002.945	98,57

		serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.408.350	27.962.945	98,43
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.408.350	27.962.945	98,43
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.408.350	28.002.945	98,57
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.408.350	27.962.945	98,43
	KELURAHAN SUNGAI PANAS				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	243.638.590	201.178.444	82,57
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	142.865.250	132.485.835	92,73
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	739.000	734.500	99,39
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.118.000	6.530.590	91,75
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	127.587.000	117.998.000	92,48
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.521.250	6.412.745	98,34
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan		900.000	810.000	90,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100.173.340	68.392.609	68,27

		terpenuhi			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	58.430.800	26.949.385	46,12
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41.742.540	41.443.224	99,28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000	300.000	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	300.000	50,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.236.406.250	3.103.305.641	95,89
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.065.374.450	2.935.455.536	95,76
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.265.700	26.697.290	97,92
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.956.479.800	2.828.943.700	95,69
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81.628.950	79.814.546	97,78
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	171.031.800	167.850.105	98,14
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	28.505.300	28.058.510	98,43
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.505.300	28.058.510	98,43

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.505.300	28.048.510	98,40
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.505.300	28.108.510	98,61
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.505.300	27.517.210	96,53
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	28.505.300	28.058.855	98,43

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batam Kota Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Batam Kota telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atau sasaran strateginya. Sebanyak 50 Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Batam Kota Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2024 pada hakikatnya berkat limpahan rahmat dan Karunia Allah SWT, serta hasil kerja sama yang baik dari seluruh pegawai Kecamatan Batam Kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, keselarasan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batam Kota ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai alat komunikasi dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah strategis agar tugas dan fungsi Kecamatan Batam Kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih. Semoga segala upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam upaya mewujudkan *good governance*.

CAMAT BATAM KOTA



FIRMAN HIDAYAT, S.E, M.M.
NIP. 19850522 201101 1 003

